



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan, membawa konsekwensi yuridis terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 51);

6.	a. Izin Lingkungan b. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 c. Izin Pemanfaatan Are' Lancor dan Taman Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	a. Izin Rumah Potong Hewan b. Izin Usaha Pemotongan Hewan c. Izin Peredaran Obat Hewan/Bahan Asal Hewan d. Izin Usaha Peternakan e. Izin Pelayanan Kesehatan Hewan ➤ Izin Dokter Hewan Praktek ➤ Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner ➤ Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
8.	a. Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan Kecil b. Tanda Daftar Nelayan	DINAS PERIKANAN
9.	a. Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta dan Penambahan Jurusan b. Izin Mendirikan Tempat Kursus	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.	a. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	DINAS PENDIDIKAN
11.	a. Izin Trayek b. Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan c. Izin Pas Kecil 5GT kebawah	DINAS PERHUBUNGAN
12.	Izin Pemanfaatan Sarana Olahraga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13.	a. Sewa Gedung Serba Guna b. Sewa Gedung Islamic Center	BAGIAN UMUM
14.	a. Sewa Videotron b. Izin Reklame	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.	Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial	DINAS SOSIAL
16.	a. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten b. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten c. Izin Pemanfaatan eks PJKA	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
17.	a. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah Kabupaten b. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
18.	Izin Pemakaian Kendaraan/Alat Berat	PERANGKAT DAERAH TERKAIT

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



H A L I L

18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 70);
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

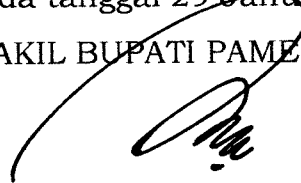
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Januari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1.	a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) b. Izin Prinsip PMDN Perluasan c. Izin Usaha Tetap d. Izin Usaha Tetap Perluasan PMDN e. Persetujuan Prinsip Non PMA/PMDN f. Rekomendasi Penyelenggaraan Hiburan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Lokasi c. Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang d. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan e. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil) f. Izin Site Plan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	a. Izin Sarana Pariwisata b. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan atau Karaoke c. Izin Membawa Cagar Budaya ke luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) d. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) e. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) f. Tanda Daftar Gudang (TDG) g. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) h. Izin Pemandokan (Rumah Kos/Rumah Kontrakan)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	a. Izin Penyelenggaraan Optik b. Izin Penyelenggaraan Laboratorium c. Izin Penyelenggaraan Apotek d. Izin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D) e. Izin Operasional Rumah Sakit f. Izin Penyelenggaraan Klinik g. Izin Toko Obat h. Izin Pengobatan Tradisional i. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) j. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah k. Izin Toko Alat Kesehatan l. Izin Operasional Puskesmas m. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga n. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa	DINAS KESEHATAN